

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, peneliti biasanya mempunyai rujukan pada penelitian terdahulu. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi *audit report lag* :

1. Muhammad Faishal dan P. Basuki Hadiprajitno (2015)

Penelitian ini berfokus pada pengaruh antara *audit report lag* dengan ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit dan rapat komite audit. Sampel yang digunakan peneliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan rapat komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sedangkan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Persamaan : Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang menggunakan dewan komisaris, komite audit dan rapat komite audit. Teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi berganda.

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu tidak meneliti tentang independensi komite audit. Sedangkan pada penelitian ini akan menambahkan variabel independensi komite audit. Sampel pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 sampai 2014 sedangkan pada

penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 sampai 2015.

2. Armania Putri Wardhani dan Surya Raharja (2013)

Penelitian ini menggunakan variabel independen ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit, kompetensi anggota komite audit, dan ukuran dewan. Pada penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu *audit firm quality*, *client complexity* dan ukuran perusahaan. Sampel pada penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dan 2011. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda yang sebelumnya dilakukan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian menunjukkan independensi komite audit, kompetensi anggota komite audit dan ukuran dewan berpengaruh terhadap *audit report lag* sedangkan komite audit, rapat komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Persamaan : Pada penelitian terdahulu menggunakan ukuran komite audit, independensi komite audit rapat komite audit dan ukuran dewan yang akan diteliti pada penelitian sekarang. Teknik analisis data pada penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan menggunakan analisis regresi berganda.

Perbedaan : Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen kompetensi anggota komite audit sedangkan pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut. Penelitian terdahulu menggunakan *audit firm quality*, *client*

complexity dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol sedangkan pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel kontrol.

3. Kogilavani Apadore dan Marjan Mohd Noor (2013)

Penelitian ini menggunakan konsentrasi kepemilikan, *internal audit investment*, komisaris independen, independensi komite audit, rapat komite audit, *audit committee expertise* dan ukuran komite audit. Peneliti menambahkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, tipe auditor dan profitabilitas. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar pada bursa efek malaysia tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan *internal audit investment* berpengaruh terhadap *audit report lag* dan independensi komite audit, rapat komite audit, *audit committee expertise*, konsentrasi kepemilikan komisaris independen, dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Dua variabel kontrol ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag* sedangkan tipe auditor tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.

Persamaan : Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan independensi komite audit, rapat komite audit dan komite audit sebagai variabel independen. Teknik analisis data juga menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.

Perbedaan : Penelitian terdahulu tidak menggunakan dewan komisaris pada penelitiannya sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel dewan

komisaris sebagai salah satu variabel independen. Teknis analisis data pada penelitian terdahulu hanya menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis regresi berganda sedangkan pada penelitian sekarang menambahkan teknik analisis uji asumsi klasik. Sampel pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia tahun 2009 dan 2010 sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013, 2014 dan 2015.

4. Ni Putu Dewiyani Swani dan Made Yeni Latrini (2013)

Penelitian ini berfokus pada karakteristik *good corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, kepemilikan insitutional dan keberadaan komite audit sebagai variabel independen. Peneliti juga menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan reputasi auditor. Sampel pada penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 2011. Hasil dari penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan insitutional dan dua variabel kontrol ukuran perusahaan dan reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit report lag*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik.

Persamaan : Pada penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan karakteristik *good corporate governance* yaitu komite audit sebagai variabel independen.

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu menggunakan kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan independensi komite audit, rapat komite audit dan dewan direksi sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 2011 sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2015.

5. Bambang Bemby S, Abukosim, Mukhtaruddin dan Imam Mursidi (2013)

Penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional, komite audit dan dewan komisaris independen sebagai variabel independen. Sampel pada penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 2011. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *audit delay*.

Persamaan : Pada penelitian sekarang dan penelitian terdahulu membahas mengenai karakteristik *good corporate governance* yaitu komite audit sebagai variabel independen.

Perbedaan : Penelitian terdahulu menggunakan *audit delay* sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan *audit report lag*. Pada penelitian terdahulu menggunakan kepemilikan institusional dan komisaris

independen sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan rapat komite audit, dewan komisaris, dan independensi komite audit. Teknik analisis pada penelitian terdahulu menggunakan analisis logistik sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan analisis regresi berganda. Sampel pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 2011 sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2015.

6. H.A.E. Afify (2009)

Penelitian ini berfokus pada pengaruh *audit report lag* pada konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, *duality of CEO*, dan *existence of an audit committee* dan menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, tipe auditor, tipe perusahaan dan *firm performance*. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan Mesir yang terdaftar pada CASE pada tahun 2007. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, *duality of CEO* dan *existence of an committee* audit berpengaruh terhadap *audit report lag* sedangkan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Juga, 3 (tiga) variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, tipe perusahaan, dan *firm performance* berpengaruh pada *audit report lag*.

Persamaan : Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan variabel independensi komite audit dan menggunakan teknik analisis data analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda.

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu menggunakan konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, *duality of CEO* dan *Existence of an committee audit* sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan dewan komisaris, rapat komite audit, komite audit dan independensi komite audit sebagai variabel independen. Sampel pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan Mesir yang terdaftar pada CASE tahun 2007 sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2015.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory atau Teori keagenan merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan antara satu *principle* atau lebih dengan agennya. Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara *principle* dengan *agent* dimana pihak *principle* mendelegasikan tugas atau pekerjaan mereka kepada pihak *agent* (A.Mallin, 2007:12). *Principle* disini adalah pemegang saham atau investor sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Menurut Bambang (2013) manajemen atau *agent* lebih mengetahui informasi internal perusahaan dan kelangsungan perusahaan dimasa depan daripada *principle* (*shareholders*) sehingga pada manajemen memiliki kepentingan lain untuk

perusahaan yang bertentangan dengan *shareholder*. Beberapa kepentingan yang berbeda antara *principle* dan agennya sehingga menimbulkan konflik atau *agency problem*.

Agar dapat mengurangi konflik atau *agency problem* tersebut dibutuhkan pihak ketiga yang dapat menghubungkan antara agen dan *principle*. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah auditor. Adanya bantuan auditor ini, diharapkan penyampaian informasi tepat waktu sangat penting untuk mengurangi beberapa konflik dari pihak *principle* dan agen dapat diselesaikan dengan baik.

2.2.2 Audit

Menurut Mulyadi (2011:2) audit merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan ekonomi dan kejadian ekonomi yang memiliki tujuan agar dapat menetapkan tingkat kesesuaian dan disampaikan hasilnya kepada para pihak – pihak yang berkepentingan. Audit adalah prosesnya sedangkan orang yang mengerjakan proses tersebut dinamakan Auditor. Menurut Halim (2015:11) auditor dapat diklasifikasikan kedalam beberapa tipe auditor antara lain :

a) Auditor Internal

Auditor internal merupakan bagian dari perusahaan atau karyawan perusahaan yang memiliki tugas melakukan audit.

b) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah yaitu seorang auditor yang bekerja di instansi pemerintahan yang memiliki tugas melakukan audit pada pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintah.

c) Auditor Independen

Auditor independen adalah para praktisi individual atau auditor yang bekerja disebuah organisasi diluar perusahaan yang memberikan jasa audit profesional ke pada kliennya.

Secara umum, dalam Halim (2015:15) ada enam prinsip etika dari profesi auditor. Salah satunya adalah kecermatan dan keseksamaaan. Auditor memerlukan kecermatan dan keseksamaaan dalam melakukan proses audit sehingga auditor memerlukan waktu cukup panjang dalam proses penyelesaian audit.

2.2.3 Audit Report Lag

Audit report lag adalah lamanya waktu penyelesaian audit diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Utami, 2006). *Audit report lag* dapat menyebabkan berkurangnya kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan. Menurut Knechel dan Payne (2001) *audit report lag* dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. *Sceduling lag*, yaitu selisih waktu antara tahun penutupan buku perusahaan dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor.

- b. *Fieldwork lag*, yaitu selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya.
- c. *Reporting lag*, yaitu selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 yang menjelaskan bahwa laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan auditan wajib diserahkan kepada OJK maksimal tiga bulan (90 hari) setelah tanggal tutup buku perusahaan. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat berpengaruh pada nilai dari perusahaan. Auditor membutuhkan waktu yang lebih untuk perusahaan – perusahaan yang mengalami kondisi tertentu sehingga harus menunda penyampaian pelaporan keuangannya kepada publik. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan – keputusan pihak internal dan eksternal terhadap perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan kondisi yang baik lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya kepada publik.

2.2.4 Good Corporate Governance

Good corporate governance merupakan sebuah struktur yang sistematis yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Adrian Sutedi (2012:2) mendefinisikan sebagai proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan berlandaskan pada peraturan perundang – undangan dan nilai – nilai etika. Tujuan dari Menurut Adrian Sutedi

(2012:10) untuk mencapai kinerja yang baik, suatu perusahaan harus memenuhi prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Transparansi

Pengungkapan yang transparan diperlukan dalam membuat keputusan ekonomi terhadap keberlangsungan perusahaan oleh *stakeholder*. Perusahaan wajib menyediakan informasi yang memadai, akurat, dapat diperbandingkan dan tepat waktu kepada *stakeholders* agar informasi tersebut dapat dikatakan transparan.

b. Dapat Dipertanggungjawabkan

Perusahaan dapat menyeimbangkan kepentingan manajemen dan pemegang saham dengan cara harus menjelaskan peran dan tanggung jawab masing – masing pihak dan diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris harus memastikan semua pihak harus patuh terhadap peraturan yang berlaku.

c. *Sustainability*

Saat perusahaan menghasilkan keuntungan, dalam jangka panjang mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harus memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja dengan baik dan adil.

d. Kejujuran

Dalam menjalankan perusahaan pihak manajemen harus mengungkapkan laporan dengan seharusnya agar *shareholder* dapat membuat keputusan untuk keberlangsungan perusahaan. Prinsip kejujuran lebih menekankan pada investor minoritas. Investor harus memiliki hak – hak yang jelas tentang

kepemilikan dan sistem aturan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak – haknya.

2.2.5 Komite Audit

Keberadaan komite audit dalam perusahaan mempunyai tujuan dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap undang – undang dan peraturan, membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab pengawasan dalam proses pelaporan keuangan, proses audit dan sistem kontrol internal perusahaan (Sawyer, 2006:511). Undang – undang Sarbanes Oxley menyatakan komite audit mempunyai tanggung jawab atas penunjukkan, pembayaran kompensasi, independensi, dan pengawasan dari auditor independen dari luar perusahaan (Sawyer, 2006:508).

Salah satu fungsi dari komite audit adalah sebagai pihak ketiga dari pemegang saham dan dewan komisaris atau dapat menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris. Dalam Effendi (2009:37) komite audit harus berkomunikasi pada pihak – pihak yang berkepentingan di suatu perusahaan. Berikut akan dijelaskan mengenai komunikasi komite audit :

- a. Komunikasi komite audit dengan dewan komisaris
Fungsi dari komite audit adalah membantu tugas dari dewan komisaris dalam pengendalian perusahaan. Dalam rapat internal, komite audit melaporkan hasil tugas yang diberikan oleh dewan komisaris dalam bentuk laporan berkala (Effendi, 2009:37).
- b. Komunikasi komite audit dengan manajemen
Menurut *Institute of Internal Auditors Research Foundation*, komite audit membutuhkan interaksi yang efektif dan signifikan terhadap manajemen dan komite audit mempunyai tanggung jawab dalam melaporkan aktivitas manajemen yang krusial bagi komite tersebut. (Effendi, 2009:38)
- c. Komunikasi komite audit dengan auditor internal
Effendi (2009:38) dalam *Statement on Auditing Standard (SAS) No. 61* menyebutkan bahwa komunikasi auditor internal dan komite audit

menyebutkan terdapat 8 hal yang dikomunikasikan oleh komite audit dan auditor internal sebagai berikut :

1. Komite audit dan auditor internal harus bertanggungjawab pada struktur kendali internal bahwa laporan keuangan perusahaan bebas dari kesalahan material.
 2. Estimasi akuntansi
 3. Memilih kebijakan akuntansi
 4. Pertanggungjawaban data non keuangan yang disepakati bersama
 5. Diskusi dalam memilih auditor eksternal
 6. Masalah proses akuntansi
 7. Dampak penyesuaian dari hasil audit
 8. Ketidaksepakatan antara manajemen dan auditor internal.
- d. Komunikasi komite audit dengan auditor eksternal
Tanggung jawab dari komite audit adalah menilai laporan audit dari auditor eksternal. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Standar auditing No. 380 mengatur mengenai komunikasi antara auditor eksternal dengan komite audit. Komunikasi antara komite audit dengan auditor eksternal berbentuk lisan ataupun tertulis (Effendi, 2009:39).

Komite audit terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang dalam suatu perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit mempunyai wewenang dalam mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, komite audit harus bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

2.2.6 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan salah satu komponen *corporate governance* yang dapat dipengaruhi *audit report lag*. Dalam Effendi (2009:9) dewan direksi mempunyai fungsi untuk mengurus perusahaan sedangkan dewan komisaris memiliki fungsi dalam pengawasan terhadap suatu perusahaan. Dewan komisaris merupakan salah satu organ dari perusahaan yang memiliki fungsi dalam mengawasi secara umum atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasehat

kepada dewan direksi. Dalam Faishal dan Hadiprajitno (2015) fungsi dari dewan komisaris adalah untuk melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan pada umumnya dan kebijakan pengurusan mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi. Dalam Setianto (2008:21) dewan pengawas atau dewan komisaris mempunyai tugas untuk menetapkan dan memelihara proses tata kelola perusahaan dan memperoleh jaminan tentang efektivitas manajemen risiko dan proses pengendalian. OJK menetapkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa dewan komisaris :

- 1) Dewan Komisaris dalam membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yg sesungguhnya dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan perusahaan.
- 2) Komisaris bertanggung jawab baik secara sendiri maupun bersama – sama terhadap kerugian pihak lain sebagai akibat pelanggaran ketentuan peraturan.

Dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang tugas dan fungsi komisaris sebagai berikut (Effendi, 2009:15) :

- a. Pasal 1 butir 2 mengungkapkan bahwa dewan komisaris sebagai salah satu organ perseroan. Butir 6 dari pasal tersebut adalah dewan komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar dan dapat memberikan nasehat pada dewan direksi.
- b. Pasal 110 ayat (1) menyatakan bahwa anggota dewan komisaris dipilih adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 tahun sebelum pengangkatan pernah :
 - a. Dinyatakan pailit
 - b. Menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - c. Melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara.
- c. Pasal 114 ayat (2) anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, bertanggung jawab dan kehati – hatian dalam menjalankan tugasnya dan memberikan nasihat kepada direksi.
- d. Pasal 114 ayat (3) menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila dewan komisaris bersalah menjalankan tugas.

Dewan komisaris dipilih oleh pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham. Semakin banyak anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka pengawasan yang dilakukan akan semakin besar.

2.2.7 Rapat Komite Audit

Seluruh anggota komite audit diharapkan untuk menghadiri setiap rapat, baik langsung maupun konferensi jarak jauh. Agenda rapat disiapkan dan diberikan di awal pertemuan kepada setiap anggota dengan materi – materi mengenai penjelasan yang sesuai (Sawyer, 2006:512). Jika diperlukan, komite audit dapat mengundang pihak dari manajemen maupun auditor atau pihak lain untuk menghadiri rapat dan menyampaikan informasi terkait (Sawyer, 2006:512). Setiap pertemuan dalam komite audit harus dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang menghadiri rapat.

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang diterbitkan pada 23 Desember 2015 melakukan pertemuan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun dengan wewenang untuk melakukan rapat – rapat tambahan. Dengan adanya pertemuan komite audit yang sering dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam perusahaan dengan cepat.

2.2.8 Independensi Komite Audit

Independensi adalah suatu kebebasan dari konflik – konflik kepentingan yang mengancam objektivitas (Sawyer, 2006:571). Komite audit dapat berkontribusi pada kualitas pelaporan keuangan dan diharapkan mampu mengurangi *audit report lag* yang terjadi (Wardhani dan Raharja, 2013). Dalam menjamin independensi komite audit, Peraturan Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Komite audit bukan merupakan orang dalam KAP atau kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan jasa konsultasi lain kepada perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris
2. Komite audit tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan publik.

Komite audit independen mengawasi aktifitas dari manajemen dan mengurangi dalam penyembunyian informasi (Apadore dan Noor, 2013). Komite audit yang independen dianggap lebih handal dalam pengawasan pada perusahaan. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang diterbitkan pada 23 Desember 2015 mensyaratkan bahwa jumlah dari komite audit tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan.

2.2.9 Hubungan Antar Variable Independen dengan *Audit Report Lag*

Berdasarkan penjelasan masing – masing variabel, maka hubungan antar variabel dependen dengan variable independen adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Komite audit dalam perusahaan mempunyai tugas dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Hasil penelitian Afify (2009) dan Bemby, Abukosim, Mukhtarudin dan Mursidi (2013) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap audit report lag sedangkan penelitian Faishal dan Hadiprajitno (2015), Apadore dan Nur (2013) menunjukkan sebaliknya.

Perusahaan di Indonesia memiliki keberagaman jumlah dalam komite audit. Semakin banyak jumlah komite audit maka akan lebih cepat dalam menemukan masalah yang terjadi dalam proses pelaporan keuangan yang dapat mengurangi keterlambatan dalam penyampaiannya ke publik. Maka, jumlah komite audit lebih banyak maka akan mengurangi *audit report lag*.

2. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag*

Dewan komisaris memiliki tugas dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perusahaan dan jalannya pengurusan kepada dewan direksi. Penelitian Faishal dan Hadiprajitno (2015) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anggota dewan komisaris sehingga dapat memonitoring dilakukan secara menyeluruh untuk dapat mendorong manajemen perusahaan bekerja sesuai ketentuan.

Perusahaan di Indonesia memiliki keberagaman dalam jumlah dewan komisaris yang dimiliki. Semakin besar dewan komisaris maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris sehingga kinerja manajemen perusahaan lebih cepat dan dapat mengurangi adanya *audit report lag*.

3. Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

Rapat dalam komite audit dilakukan secara periodik. Dengan semakin banyaknya rapat yang dilakukan oleh komite audit maka masalah internal perusahaan dapat terpecahkan lebih cepat. Adanya frekuensi pertemuan komite audit yang tinggi dapat mengurangi *audit report lag* pada perusahaan (Faishal dan Hadiprajitno, 2015). Hasil penelitian dari Faishal dan Hadiprajitno (2015) dan Apadore dan Nur (2013) menunjukkan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* sedangkan Wardhani dan Raharja (2013) sebaliknya.

Adanya frekuensi rapat yang tinggi maka komite audit dapat membuat pembaharuan dalam informasi yang akan dibicarakan dalam rapat komite audit perusahaan sehingga dapat segera terselesaikan masalah dengan cepat. Jika komite audit menemui suatu masalah yang dihadapi dalam proses laporan keuangan, dan frekuensi pertemuan komite audit yang rendah maka masalah tidak dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu frekuensi rapat komite audit yang tinggi dapat memperkecil *audit report lag*.

4. Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*

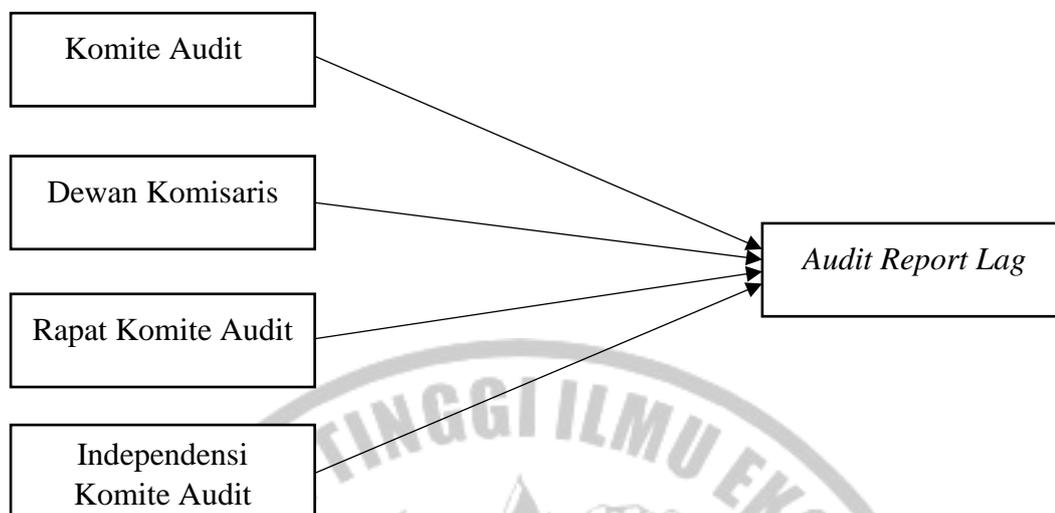
Menurut Beasley dan Salterio (2001) dalam Wardhani dan Raharja (2013) perusahaan memiliki kemampuan dalam meningkatkan komite audit dengan

memiliki anggota komite audit independen yang lebih banyak daripada yang disyaratkan undang – undang. Penelitian Wardhani dan Raharja (2013) dan Afify (2009) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag* tetapi negatif.

Teori dan Hipotesis ini bertumpu pada teori agensi, dimana pihak pemilik (*principle*) termotivasi terhadap transparansi, tidak adanya kelalaian dan ketepatan waktu yang dilakukan oleh *agent*. Dengan semakin banyaknya komite audit independen maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin besar dan masalah yang terjadi dalam perusahaan akan cepat ditemukan dengan demikian dapat memperkecil keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan perusahaan ke publik sehingga semakin banyak jumlah komite audit independen akan memperkecil *audit report lag*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Banyak faktor yang mempengaruhi lamanya proses penyelesaian audit pada perusahaan atau biasa yang disebut *audit report lag*. Dalam penelitian kali ini menggunakan 4 faktor yang sebelumnya sudah pernah di uji oleh peneliti terdahulu dan akan di uji kembali pada penelitian ini. Penelitian ini menganalisis beberapa variabel yang dianggap berpengaruh terhadap *audit report lag*.



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian teoritis diatas maka hipotesis disusun sebagai berikut :

- H1 : Komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*.
- H2 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap *audit report lag*.
- H3 : Rapat komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*.
- H4 : Independensi komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*.